

FENOMENA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DI KOTA PEKANBARU

Mardiana

Fakultas Ekonomi Universitas Riau

ABSTRAK

Pada tahun 2005 dan 2008 telah terjadi kenaikan harga minyak. Keadaan ini menyebabkan bertambahnya penduduk miskin. Tujuan kertas kerja ini adalah untuk menjelaskan fenomena rumah tangga miskin penerima bantuan langsung tunai di Kota Pekanbaru. Pemilihan responden dengan metode klaster yang ditarik dengan memisahkan elemen-elemen populasi dalam kelompok lokasi kemudian dipilih secara acak dari setiap lokasi. Kajian ini menggunakan metode pengumpulan data melalui wawancara dengan responden. Rumah tangga miskin penerima bantuan langsung tunai bercirikan berpendidikan rendah, memiliki tabungan rendah, tidak memiliki ternak dan memiliki sepeda motor. Kemiskinan penduduk Kota Pekanbaru utamanya karena kebijakan pemerintahan.

Kata Kunci : *Bantuan Langsung Tunai, Miskin*

1. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai salah satu negara yang terkena dampak kenaikan harga minyak, padahal Indonesia baru saja bangkit dari krisis ekonomi yang melanda Asia Tenggara pada tahun 1998. Kenaikan harga minyak semakin memperburuk kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat miskin di Indonesia. Oleh karena itu, pada tahun 2005 dan 2008 pemerintah Indonesia mengeluarkan suatu kebijakan ekonomi di bawah Kementerian Sosial bagi mengurangi kemiskinan. Salah satu program tersebut dinamakan Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Program BLT merupakan program dengan ciri khusus yang berbeda dengan bantuan program untuk masyarakat miskin lain. Program ini jangka pendek bagi masyarakat miskin di kota. Program ini lebih bersifat “*bukan memberikan kail untuk menangkap ikan*”, tetapi lebih merupakan “*memberikan ikan agar tidak lapar sehingga dapat memancing kembali seperti biasanya*”.

Program BLT dilaksanakan hanya pada masa-masa tertentu saja, seperti baik kenaikan harga minyak atau puso akibat musim kemarau. Program BLT ini memberi uang secara cuma-cuma, yaitu sebanyak Rp 300.000 selama tiga bulan pada tahun 2005 dan sebanyak Rp 600.000 untuk enam bulan pada tahun 2008. Pada tahun 2008 pemberian uang secara cuma-cuma ini diganti dengan pemberian uang dengan 14 syarat yang disusun berdasarkan ciri kemiskinan menurut BPS.

2. TINJAUAN TEORI

Townsend (1979) mengkaji rumah tangga dan tingkat hidup masyarakat kota di Inggris. Townsend memberi definisi kemiskinan sebagai berikut, “kekurangan sumberdaya yang diperlukan untuk meningkatkan kemampuan seseorang berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan, adat dan pemenuhan makanan yang biasanya diterima masyarakat”. Sumberdaya itu tidak terbatas hanya kepada pendapatan tunai. Ianya juga merangkumi aset modal seperti rumah yang ditempati dan dimiliki keluarga serta aset-aset lain selain dari rumah yang ditempati. Nilai manfaat suatu pekerjaan seperti subsidi dan nilai asuransi pekerjaan, fasilitas pekerjaan.

Danzinger et al. (1981) menyebutkan bahwa semua program pengentasan kemiskinan jangka pendek telah mengurangi jumlah jam kerja di bidang ekonomi sampai kurang dari 5%. Malaysia meletakkan mekanisme untuk mendistribusikan sumberdaya material dan kedudukan sosial. Masyarakat Malaysia setelah Kebijakan Ekonomi Baru (KEB) telah mengalami beberapa perubahan hingga ketimpangan pendapatan antar etnik telah menurun, kemiskinan telah hampir diatasi, dan budaya hidup kelas menengah telah menjadi kenyataan. Efektif dan efisiensi dalam memahami sasaran masyarakat miskin adalah hal yang paling penting sehingga masyarakat miskin mendapat manfaat dari program-program pemerintah (Siwar, 2001).

Todaro dan Smith (2003) menyatakan bahwa di negara sedang membangun terdapat sejumlah besar tenaga kerja di kota yang tidak memperoleh tempat atau pekerjaan di sektor formal. Mereka lebih banyak tinggal di kawasan-kawasan kotor serta menciptakan kawasan pemukiman kumuh. Para migran harus mencipta lapangan kerja sendiri atau bekerja pada perusahaan-perusahaan kecil keluarga, seperti menjadi penjaja jalanan. Sedangkan yang memiliki sedikit kemahiran mencari pendapatan sebagai mekanik, membuka pangkas dan menjadi pegawai rendah. Kajian yang dilakukan oleh Todaro di pesisir kota-kota di negara miskin, menyatakan bahwa kemiskinan tersebut mencipta berbagai status dalam ekonomi dan sosial mulai dari kelas atas sampai kelas bawah.

Schreiner dan Sherraden (2006) melahirkan konsep membina aset dan investasi sosial sebagai salah satu aspek ekonomi masyarakat miskin. Risiko kemiskinan akan berkurang jika ada bantuan tunai yang dapat mengatasi halangan-halangan struktur yang selama ini menghalang mereka untuk menyertai dalam kegiatan ekonomi. Meskipun terdapat hubungan yang kuat antara pendapatan dan aset, keduanya merupakan konsep yang berbeda. Konsep membina aset ini memfokuskan pada bagaimana orang-orang miskin dan keluarganya untuk dapat menabung meski dalam jumlah yang kecil, berinvestasi dengan membeli barang mudah jual, dan menggunakan tabungannya untuk tujuan-tujuan tertentu.

Transformasi ekonomi dapat menimbulkan beberapa risiko kepada golongan miskin walaupun transformasi juga dapat menyediakan berbagai peluang. Risiko dan kelemahan mengekang golongan miskin dari mendapat kesempatan dari peluang ekonomi. Tetapi risiko juga dapat mengurangi tahap kesejahteraan di waktu depan (Holzmann dan Kozel, 2007). Oleh itu, dengan mengurangi kelemahan atau menyediakan manajemen risiko yang lebih baik, perlindungan sosial yang menyediakan golongan miskin dengan bantuan bukan saja untuk menghadapi kejutan atau krisis, tetapi juga untuk membantu mereka keluar dari belenggu kemiskinan dalam jangka panjang.

Menurut Bender et al. (2008), dengan mengurangi keraguan terhadap para anggota masyarakat, kebijakan perlindungan sosial menggalakkan individu untuk mengambil risiko dalam pekerjaannya, seperti berinvestasi melalui membuka peluang-peluang bisnis. Barrientos dan Hulme (2008) menyatakan bahwa perlindungan sosial pada dasarnya adalah program yang dijalankan oleh pemerintah atau masyarakat untuk menyediakan sokongan dan bantuan bagi golongan miskin dalam menghadapi kesukaran, kelemahan mereka dan serba kekurangan. Konvensi ILO juga menyifatkan perlindungan sosial sebagai satu bentuk keselamatan sosial yang menyediakan bantuan kepada orang termiskin untuk diberikan haknya dalam jumlah yang mencukupi untuk memenuhi taraf kebutuhan minimum (Munro, 2008).

Martin (1983) menyebutkan bahwa pola pengentasan kemiskinan di Indonesia masih mengutamakan kepada satu program, yaitu program Instruksi Presiden Daerah Tertinggal (IDT) dan lebih mengutamakan prinsip “*patron-client*”. Pemerintah Indonesia lebih mengutamakan masyarakat yang memilih partai memerintah yang akan diberikan bantuan, sehingga ketika program ini diluncurkan ada beberapa kawasan yang tidak mendapatkan bantuan, karena bukan kawasan pendukung partai pemerintah.

Menentukan suatu program pengurangan kemiskinan perlulah dimulai dengan pengukuran kemiskinan yang tepat. Pengukuran kemiskinan sangat dipengaruhi oleh perspektif pendapatan sebagai satu-satunya indikator pendapatan garis kemiskinan dalam ekonomi (Suharto, 2004). Kajian tentang program pengentasan kemiskinan jangka pendek pertama kali dilakukan di Indonesia oleh Hastuti et al. (2006).

Pembangunan banyak dilakukan pada pembangunan kota. Kecenderungan itu menimbulkan efek perpindahan masyarakat luar kota ke kota demi mendapatkan pekerjaan dan menimbulkan urbanisasi. Hal ini terutama di kota-kota besar di pulau Jawa. Kekurangan kemahiran dari para migran ini menyebabkan pengangguran dan membentuk suatu kawasan kemiskinan di kota (Izzah, 2009).

3. METODE PENELITIAN

Kajian ini menggunakan metode pengumpulan data secara langsung bertemu muka kepada responden. Dalam penggunaan metode langsung ini responden diberikan pertanyaan secara langsung dan diminta untuk mengisi semua pertanyaan yang ada dalam kuesioner itu. Namun, untuk kajian yang tidak dapat memastikan waktu wawancara dapat menggunakan metode *snow ball*.

Pertanyaan yang digunakan dalam kajian ini dirancang secara terstruktur untuk memudahkan responden memahami pertanyaan. Kemudian pertanyaan dibagi kedalam tiga bagian utama, yaitu latar belakang responden dan pemahaman tentang BLT, aspek sosial (pendidikan, status perkawinan, anak, jumlah keluarga) dan aspek ekonomi (kepemilikan aset seperti rumah/kendaraan, peningkatan jumlah pendapatan sebulan, jumlah tanggungan, dan lain-lain). Pertanyaan aspek sosial dan ekonomi ini dikaitkan dengan jumlah uang yang didapati dari BLT tahun 2005 dan 2008.

Pemilihan responden dengan metode kluster yang ditarik dengan memisahkan elemen-elemen populasi dalam kelompok lokasi kemudian dipilih secara acak dari setiap lokasi (Nazir, 1988). Untuk mengukur nilai ketepatan dalam hasil maka diambil sebesar 5% sesuai ketentuan yang dilakukan oleh Yamane (1963) dalam menentukan tahap kesilapan (*error*).

4. HASIL PENELITIAN

Pada tahun 2005 dan 2008 adalah waktu yang sangat menyusahkan, dimana harga minyak dunia naik sampai 4 kali lipat, hal tersebut sangat mempengaruhi negara-negara membangun seperti Indonesia yang memiliki masyarakat miskin hampir 30%. Jika harga minyak di Indonesia tidak dinaikkan, maka akan terjadi perbedaan harga yang sangat besar antara harga minyak di dalam negeri dengan luar negeri.

Subsidi minyak di Indonesia menurut kajian yang dilakukan oleh Universiti Indonesia (2004) lebih banyak dinikmati oleh kelompok masyarakat menengah dan kaya. Minyak banyak digunakan oleh mereka yang memiliki kendaraan. Pemilik kendaraan ini biasanya dikategorikan sebagai masyarakat yang mampu, karena semakin kaya seseorang atau rumah tangga semakin banyak kendaraan yang dimiliki yang berarti semakin banyak menggunakan minyak.

Dengan demikian keluarga dengan isi rumah berpendapatan tinggi menikmati dana subsidi minyak dari pemerintah jauh lebih banyak berbanding keluarga miskin. Hasil sensus BPS pada tahun 2004 menunjukkan 70% subsidi minyak dinikmati oleh keluarga menengah ke atas (40% isi rumah terkaya).

Berdasarkan data sensus BPS (2007) pengguna minyak/kapita/hari untuk pengangkutan publik sudah termasuk bis hanya Rp 0.9 sen. Jika ada kenaikan harga kenaikan harga pengangkutan publik untuk 1/3 keluarga berpendapatan terendah di Indonesia ini akan sepenuhnya dapat digunakan oleh program BLT.

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Program BLT untuk Rumah Tangga Sasaran (RTS) dalam ganti rugi pengurangan subsidi minyak. Pelaksanaannya harus langsung menyentuh dan memberi manfaat kepada masyarakat miskin, mendukung tanggung jawab sosial bersama dan dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat kepada perhatian pemerintah yang berkesinambungan serta benar-benar memperhatikan RTS yang pasti merasakan beban yang berat dari kenaikan harga minyak.

Untuk memahami tingkat kemiskinan responden maka hasil kajian dari lapangan dianalisis mengguakan table silang. Hasil dari informasi statistik tersebut pada beberapa keterangan dikonfirmasi dengan informan kunci untuk semakin memperdalam hasil kajian. Pada Tabel 1 terlihat pendapatan keluarga para responden antara \leq Rp.500,000 dan Rp. 501.000-Rp.1.000.000 atau 49,1% yang merupakan lulusan SD, kemudian terdapat 57,9% berpendidikan SMP dengan pendapatan keluarga Rp. 1 - 501.000 dan berpendidikan SMA dan lainnya dengan persentase sebesar 50,6% dengan pendapatan antara Rp. 501.000-Rp.1.000.000. Informasi tersebut menunjukkan bahwa ada asosiasi antara pendidikan dengan pendapatan responden, pada pengujian 5%.

Tabel 1. Pendapatan Keluarga Berdasarkan Latar Belakang Responden

Pendidikan	Pendapatan		
	\leq Rp. 500.000	Rp. 500 ribu - Rp.1 juta	> Rp.1 juta
SD	49,1	49,1	1,8
SMP	57,9	35,5	6,5
SMA+Lainnya	38,8	50,6	10,6

Sumber: Hasil Penelitian, 2010

Dalam memahami fenomena kemiskinan, kajian ini menggunakan ciri dari BPS pusat yang terdiri dari 14 ciri. Setiap kota dapat mengembangkan informasinya menjadi lebih banyak tergantung dari besar atau kecilnya kawasan tersebut. Ciri masyarakat miskin di kota Pekanbaru terdiri dari beberapa ciri kemiskinan menurut BPS kota Pekanbaru, dikarenakan kawasan Pekanbaru adalah kawasan kota terbesar yang dimiliki Provinsi Riau. Ciri kemiskinan itu ialah bangunan rumah, fasilitas sanitasi, fasilitas listrik, bahan bakar utama, jenis pemakanan, pola makan, pakaian ganti, kesehatan, tabungan, perhiasan, televisi berwarna, ternak, jenis sepeda motor, bantuan kredit dan rumah tinggal. Ciri ini sebagai langkah awal yang dilakukan BPS dalam membuat sensus seseorang kepala rumah tangga mendapatkan BLT.

Bahan bakar utama yang digunakan responden adalah bahan bakar yang digunakan untuk memasak, seperti gas, minyak tanah ataupun kayu bakar. Terdapat 48,8% responden menyatakan bahan bakar utama untuk memasak mudah didapat dan murah. Di tengah-tengah kemajuan kota masih ada masyarakat miskin yang menggunakan minyak tanah untuk kebutuhan memasak pada waktu tersebut, karena Indonesia baru mengkonversi bahan bakar utama dari minyak ke gas pada tahun 2008. Minyak tanah sekarang mengalami kekurangan produksi karena minyak tanah yang menjadi material dalam pembuatan gas yang diubah oleh pemerintah Indonesia melalui program gas nasional, sehingga merubah kebiasaan masyarakat Indonesia pada umumnya, dari menggunakan minyak tanah untuk kebutuhan memasak kepada bahan bakar gas. Oleh karena itu masyarakat pada ciri tersebut sebagai salah satu ciri dari fenomena kemiskinan.

Fenomena kemiskinan berkaitan dengan kepemilikan tabungan responden rumah tangga sasaran. Salah satu peranan penting dari tabungan adalah ketika seseorang memerlukan uang yang cepat dapat mengeluarkan uangnya dengan mudah untuk berbagai kebutuhan yang mendesak. Tabungan ini tidaklah harus menabung di bank, dapat juga dengan menabung di rumah sebagai langkah untuk menghindari keadaan terdesak misalnya ada anggota keluarga yang sakit dan perlu pengobatan maka uang dari tabungan tersebut dapat digunakan.

Ada asosiasi antara pendidikan dengan fenomena kemiskinan berkaitan dengan kepemilikan tabungan. Persentase dari responden perempuan lebih banyak memiliki tabungan dibandingkan dengan laki-laki karena perempuan biasanya pandai dalam mengatur keuangan keluarga. Yunus (2009) lebih mempercayai perempuan untuk memberikan pinjaman keuangan karena perempuan lebih mudah mengatur keuangan keluarga dibandingkan laki-laki. Hasil ini menunjukkan bahwa mayoritas dari responden menyatakan tidak memiliki tabungan dan merupakan salah satu fenomena kemiskinan dari para responden.

Kepemilikan ternak menjadi ciri tersendiri dari responden rumah tangga sasaran di Kota Pekanbaru. Jika responden memiliki ternak, baik ayam, lembu atau kambing, tidak akan dicirikan miskin karena haiwan tersebut mudah untuk dijual atau dimasak untuk kebutuhan harian. Dalam kajian ini mayoritas pemilik ternak ini berpendidikan terakhir adalah SD. Terdapat asosiasi yang signifikan pendidikan dengan fenomena kemiskinan berkaitan dengan kepemilikan ternak.

Di kawasan perkotaan, ternak yang memungkinkan dimiliki oleh responden ini adalah ayam dan kambing, sedangkan lembu tidak memungkinkan dipelihara karena lembu memerlukan tempat yang luas sebagai kandangnya, padahal rumah masyarakat miskin ini memiliki luas tanah yang kecil sehingga tidak memungkinkan mereka memeliharanya. Ayam memiliki dua manfaat, daging atau telurnya dapat digunakan sebagai salah satu sumber makanan dan tambahan makanan berupa protein hewani, sedangkan kambing hanya dagingnya.

Sepeda motor dengan harga kurang dari Rp. 500.000 dijadikan salah satu penunjuk oleh BPS, karena sepeda motor merupakan barang yang mudah untuk dijual dan dapat digunakan untuk kebutuhan pergerakan yang mempermudah perekonomian seseorang. Sepeda motor biasanya digunakan untuk berbagai kepentingan peniagaan. Harga sepeda motor di bawah Rp 500.000 yang ditentukan BPS bisa menjadi bias, karena dengan keadaan sekarang di Indonesia yang dapat membeli sepeda motor baru dengan cara kredit hanya dengan uang muka sebesar Rp 100.000 saja.

Temuan dari hasil kajian dapat dituliskan bahwa mayoritas memang responden memiliki sepeda motor dengan harga minimum Rp 500.000. Dengan demikian disimpulkan bahwa memiliki sepeda motor dengan harga minimum Rp. 500,000 merupakan salah satu fenomena yang dapat dipertimbangkan dalam kemiskinan rumah tangga sasaran.

Fenomena lain dari rumah tangga sasaran penerima BLT adalah dengan pernah mendapatkan bantuan kredit usaha pada tahun sebelumnya. Informasi dari wawancara menunjukkan mayoritas responden pernah mendapatkan bantuan kredit usaha tahun sebelumnya. Fenomena ini menjadi satu pertimbangan karena bantuan kredit usaha yang seharusnya mampu mengangkat derajat ekonomi masyarakat ternyata tidak memberi manfaat yang signifikan.

Beberapa ciri kemiskinan yang dimiliki oleh rumah tangga sasaran seperti pendidikan rendah, memiliki tabungan rendah, tidak memiliki ternak dan pernah mendapat bantuan kredit dari pemerintah. Sumodiningrat (1999) mengkonsepsikan bahwa fenomena kemiskinan itu bersifat dengan hanya ciri sebagian dapat disebut dengan kemiskinan relatif. Kemiskinan tersebut lebih dikarenakan pelapisan sosial berdasarkan karena struktural, dimana kemiskinan ini lebih banyak disebabkan oleh kebijakan yang berlaku di suatu pemerintahan.

Kemiskinan di kota Pekanbaru bukanlah kemiskinan seperti yang digambarkan oleh Lewis (1961), yang menyatakan bahwa kemiskinan adalah disebabkan oleh suatu budaya yang dibawa secara turun temurun. Kemiskinan ini menurut Schaefer dan Lamm (1999) lebih kepada peringkat struktur sekelompok orang yang memiliki ketimpangan di bidang ekonomi dan kekuatan saja. Oleh karena itu fenomena masyarakat miskin di Pekanbaru lebih dikarenakan kemiskinan secara struktur atau lebih disebabkan oleh pengaruh kekuasaan.

5. PENUTUP

Program-program bantuan yang sebaiknya diberikan untuk membantu masyarakat kota adalah program-program pelatihan kemahiran, pemberian kredit usaha, uang tunai, bantuan berupa barang usaha, bantuan kebutuhan harian dan pencarian kerja. Mayoritas dari responden menjawab lebih menyenangi program bantuan yang bersifat uang tunai, karena lebih mudah tidak berbelit-belit dengan urusan birokrasi yang panjang, kemudian pencarian kerja dan bantuan modal untuk usaha.

Hal ini berarti bahwa masyarakat miskin di Pekanbaru lebih menyenangi *crushed program* dibandingkan dengan program-program pemberdayaan (keikutsertaan) dalam mencari kerja atau modal untuk bisnis. Program-program yang bersifat jangka panjang dan lama lebih tidak disukai oleh masyarakat miskin karena menyusahkan seperti harus membuat proposal untuk mengajukan bisnis kepada pemberi program. Padahal dengan adanya program ini sebetulnya jika berhasil masyarakat miskin akan sangat mudah keluar dari kemiskinan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Barrientos, A. dan D. Hulme, 2008. *Social Protection for the Poor and Poorest: Concepts, Policies and Politics*. London. Palgrave.
- Bender, K., E. Feess, J. Holst, J. Knoess, A.A.O. Mahendra, M.W. Manicki, A.E. Putri, H.J. Rösner, T. Schramm, S. Soejitno, P. Suder, F. Tibitz, I. Vernekohl, F. von Roenne dan S. Zimpel, 2008. *Options for Social Protection Reform in Indonesia*. Jakarta. Gradasi.
- Danziger, S., R. Haveman dan R. Plotnick. 1981. How Income Transfer Programs Affect Work, Savings, and the Income Distribution: A Critical Review. *Journal of Economic Literature* 19, hal. 975-1028.
- Hastuti, S. Sumarto, N. Toyamah, S. Usman, B. Sulaksono, S. Budiayati, W.D. Widyanti, M. Rosfadhila, H. Sadaly, S. Erlita, R.J. Sodo dan S. Bazzi, 2006. *Kajian Cepat Pelaksanaan Subsidi Langung Tunai Tahun 2005 Di Indonesia: Studi Kasus Di Lima Kabupaten/Kota*. Jakarta. Lembaga Penelitian SMERU.

- Holzmann, R. dan V. Kozel, 2007. The Role of Social Risk Management in Development: A World Bank View, *IDS Bulletin* 38(3), hal. 8-13.
- Izzah, M., 2009. *Multidimensi Kemiskinan*. Surakarta. LPP UNS.
- Martin, P. 1993. *Trade and Migration: NAFTA and Agriculture*. Washington: Institute for International Economics.
- Munro, L.T., 2008. Risks, rights and needs: Compatible or contradictory bases for social protection. Di dalam (Peny.) A. Barrientos dan D. Hulme, *Social Protection for the Poor and Poorest: Concepts, Policies and Politics*. London. Palgrave.
- Nazir, M., 1988, *Metodologi Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Schreiner, M., G.T. Ng dan M. Sherraden, 2006. Cost-Effectiveness in Social Work Practice: A Framework with Application to Individual Development Accounts, *Research on Social Work Practice* 16 (1), hal. 28–37.
- Siwar, C., 2001. *Pembangunan Maman: Strategi 'Menang-menang' untuk Pembasmian Kemiskinan dan Pemuliharaan Alam Sekitar*. Bangi. Universiti Kebangsaan Malaysia.
- Suharto, E., 2004. *Kemiskinan dan Keberfungsian Sosial: Studi Kasus Rumah Tangga Miskin di Indonesia*. Bandung. STKS Press.
- Sumodiningrat, G., 1999. Pembangunan Daerah dan Pengembangan Kecamatan (Dalam Perspektif Teori dan Implementasi). *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota* 10(3), hal. 146 – 159.
- Todaro, M.P. dan S.C. Smith, 2003. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jilid I. Edisi Kedelapan. Erlangga, Jakarta.
- Townsend, P. 1979 *Poverty in the United Kingdom: A Survey of Household Resources and Standards of Living*. Berkeley, University of California Press.